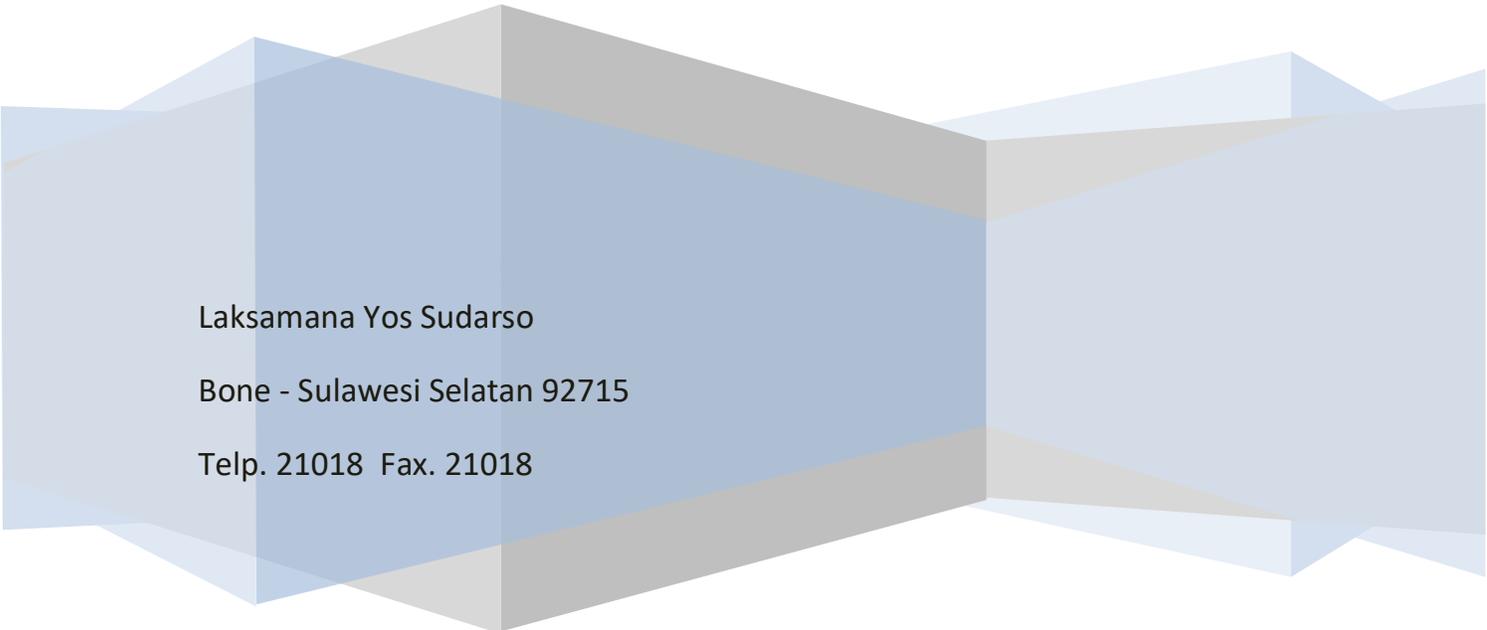


PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

LAPORAN KEUANGAN

307509

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2021



Laksamana Yos Sudarso
Bone - Sulawesi Selatan 92715
Telp. 21018 Fax. 21018



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2021

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

**Laksamana Yos Sudarso
Telp. 21018 Fax. 21018
Bone - Sulawesi Selatan 92715
e-mail : watampone@pta-makassarkota.go.id**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Watampone adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Pengadilan Agama Watampone yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Watampone. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Watampone, 6 Juli 2021
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Watampone

H.A.Fajar Sawerilongi, SE.,M.Si.
NIP. 197412142006041002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vi
RINGKASAN	vii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	ix
NERACA	x
LAPORAN OPERASIONAL	xii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	12
A. PENJELASAN UMUM	12
A.1. Dasar Hukum.....	12
A.3.Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	14
5.Dasar Pengukuran.....	15
6.Kebijakan Akuntansi.....	15
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	21
B.1 Pendapatan.....	22
B.2 Belanja Pegawai.....	25
B.3 Belanja Barang.....	25
B.4 Belanja Modal.....	26
B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	26
B.4.2 Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan.....	27
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	20
C.1 Persediaan.....	20
C.2 Tanah.....	20
C.3 Peralatan dan Mesin.....	29

C.4 Gedung dan Bangunan	29
C.5 Jaringan	30
C.6 Aset Tetap Lainnya	31
C.17 Aset Lain–Lain	31
C.18 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	32
C.19 Utang kepada Pihak Ketiga	32
C.20 Ekuitas	32
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	60
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	60
D.2 Beban Pegawai	60
D.3 Beban Persediaan	61
D.4 Beban Barang dan Jasa	61
D.5. Beban Pemeliharaan	62
D.6 Beban Perjalanan Dinas	62
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	63
D.9 Surplus dari Kegiatan Non Operasional	63
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	65
E.1 Ekuitas Awal	65
E.2 Defisit LO	65
E.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap	65
E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	65
E.5 Transaksi Antar Entitas	65
E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	66
E.5.2 Transfer Masuk	66
E.6 Ekuitas Akhir	66
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	68
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	68
F.2. Pengungkapan Lain-Lain	68

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan</i>	<i>22</i>
<i>Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBPN TA 2020 dan TA 2018</i>	<i>23</i>
<i>Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 30 Juni 2021</i>	<i>23</i>
<i>Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2020 dan TA 2018</i>	<i>24</i>
<i>Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2020 dan TA 2018</i>	<i>25</i>
<i>Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang TA 2020 dan TA 2018</i>	<i>25</i>
<i>Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal TA 2020 dan TA 2018</i>	<i>26</i>
<i>Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 dan TA 2018</i>	<i>27</i>
<i>Tabel 9. Rincian Persediaan</i>	<i>20</i>
<i>Tabel 10. Rincian Saldo Tanah Per 30 Juni 2021</i>	<i>26</i>
<i>Tabel 12. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya</i>	<i>32</i>
<i>Tabel 13. Perbandingan Rincian Pendapatan 30 Juni 2021 dan</i>	<i>60</i>
<i>Tabel 14. Perbandingan Rincian Beban Pegawai 30 Juni 2021 dan</i>	<i>61</i>
<i>Tabel 15. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 30 Juni 2021 dan</i>	<i>61</i>
<i>Tabel 16. Rincian Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2018</i>	<i>62</i>
<i>Tabel 17. Rincian Beban Pemeliharaan 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2018</i>	<i>62</i>
<i>Tabel 18. Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2018</i>	<i>62</i>
<i>Tabel 19. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi</i>	<i>63</i>
<i>Tabel 21. Rincian Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2021 dan</i>	<i>63</i>

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Jl. Lak. Yos Sudarso No. 49 A Watampone

Telp. 0481-21018 Fax. 0481-21018 e-mail : watampone.pta-makassarkota.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone Semester I tahun 2021 (*Audited*) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sampai dengan 30 Juni 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Watampone, 6 Juli 2021
Kuasa Pengguna Anggaran

H.A.FAJAR SJAM SAWERILONGI, SE.,M.SI
NIP.197412142006041002



RINGKASAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone Tahun 2021 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2021. Realisasi Pendapatan Negara Semester I TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3.738.168,00 dari estimasi pendapatan sebesar Rp9.520.000,00 atau mencapai 39,27 persen. Realisasi Belanja Negara Semester I TA 2021 adalah sebesar Rp6.319.194,778,00 atau mencapai 42,07 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp15.019.317,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Semester I Tahun 2021. Nilai Aset per Semester I Tahun 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp13.010.573.647,00, yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp27.962.700; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp12.747.414.733,00; Utang Jangka pendek (utang kepada Pihak ketiga) sebesar Rp0,-; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp235.196.214,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp12.983.573.647,00 dan Rp13.010.573.647,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp3.737.550,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp6.491.160.691,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(6.487.423.141,00). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp618,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp(6.487.422.523,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp13.155.539.560,00 dikurangi defisit-LO sebesar Rp(6.487.422.523,00), kemudian ditambah dengan koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp0,00 dan ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp6.315.456.610,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2021 adalah senilai Rp12.983.573.647,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA 2021 DAN TA 2020

URAIAN	CATATAN	TA 2020			TA 2020		
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN
PENDAPATAN							
1. Pendapatan	B.1	9.520.000,00	7.007.249,00	73,61	14.672.000,00	7.007.249,00	47,76
Jumlah Pendapatan		9.520.000,00	7.007.249,00	73,61	14.672.000,00	7.007.249,00	47,76
BELANJA							
1. Belanja Pegawai	B.2	13.559.833.000,00	5.750.363.745,00	42,41	12.451.762.000,00	5.429.952.772,00	43,61
2. Belanja Barang	B.3	1.394.484.000,00	568.831.033,00	40,79	1.388.947.000,00	798.585.444,00	57,50
3. Belanja Modal	B.4	65.000.000,00	-	-	195.000.000,00	169.750.000,00	87,05
Jumlah Belanja		15.019.317.000,00	6.319.194.778,00	42,07	14.035.709.000,00	6.398.288.216,00	45,59

NERACA

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
NERACA
PER 30 Juni 2021 DAN 2020

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH	
		30 Juni 2021	31 DESEMBER 2020
1	2	3	4
ASET			
Aset Lancar	C		
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C. 1	-	-
Piutang Bukan Pajak	C. 2	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C. 3	-	-
Piutang Bukan Pajak (Netto)		-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C. 4	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C. 5	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran		27.000.000,00	-
Persediaan	C. 6	962.700,00	809.350,00
Jumlah Aset Lancar		27.962.700,00	809.350,00
Aset Tetap			
Tanah	C. 7	5.238.828.000,00	5.238.828.000,00
Peralatan dan Mesin	C. 8	2.260.106.818,00	2.379.973.218,00
Gedung dan Bangunan	C. 9	7.779.656.000,00	7.928.483.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C. 10	19.988.100,00	19.988.100,00
Aset Tetap Lainnya	C. 11	14.997.470,00	14.997.470,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C. 12	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C. 13	(2.566.161.655,00)	(2.500.788.876,00)
Jumlah Aset Tetap		12.747.414.733,00	13.081.480.912,00
Piutang Tagihan TP/TGR	C. 14	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	C. 15	-	-
Tagihan TP/TGR (Netto)		-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C. 16	-	-
Aset Lain-Lain	C. 17	427.904.400,00	159.211.000,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C. 18	(192.706.186,00)	(61.502.092,00)
Jumlah Aset Lainnya		235.198.214,00	97.708.908,00
JUMLAH ASET		13.010.575.647,00	13.179.999.170,00
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C. 19	27.000.000,00	24.459.610,00
Pendapatan Diterima Dimuka	C. 20	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		27.000.000,00	24.459.610,00
JUMLAH KEWAJIBAN		27.000.000,00	24.459.610,00
EKUITAS			
Ekuitas	C. 21	12.983.573.647,00	13.155.539.560,00
JUMLAH EKUITAS		12.983.573.647,00	13.155.539.560,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		13.010.573.647,00	13.179.999.170,00

LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE LAPORAN OPERASIONAL TA 2021 DAN TA 2020

URAIAN	CATATAN	TA 2021	TA 2020
1	2	3	4
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
PENDAPATAN PERPAJAKAN			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA		3.737.550	7.007.177
PENDAPATAN HIBAH			
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	D. 1	3.737.550	7.007.177
BEBAN			
BEBAN PEGAWAI	D. 2	5.735.403.321	5.392.910.230
BEBAN PERSEDIAAN	D. 3	6.672.650	14.469.300
BEBAN BARANG DAN JASA	D. 4	479.898.697	490.128.241
BEBAN PEMELIHARAAN	D. 5	49.607.150	261.726.174
BEBAN PERJALANAN DINAS	D. 6	23.000.000	22.924.411
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	D. 7	196.578.873	184.856.885
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	D. 8	-	-
JUMLAH BEBAN		6.491.160.691	6.367.015.241
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(6.487.423.141)	(6.360.008.064)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		618	2.406.572
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	1.213.950
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		618	1.192.622
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D. 9	618	1.192.622
POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS (DEFISIT) LO		(6.487.422.523)	(6.358.815.442)

LAPORAN**PERUBAHAN EKUITAS**

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
30 Juni 2021 DAN 2020

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2021	30 JUNI 2020
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	E. 1	13.155.539.560,00	11.697.766.712,00
SURPLUS / DEFISIT	E. 2	(6.487.422.523,00)	(6.358.815.442,00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKKUITAS			-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR			-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3		-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 4	-	-
Koreksi lain-lain	E. 5	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E. 6	6.315.456.610,00	6.391.280.967,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(171.965.913,00)	32.465.525,00
EKUITAS AKHIR	E. 7	12.983.573.647,00	11.730.232.237

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar

Hukum

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 90/PMMK.06/2014;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Watampone

Profil dan
Kebijakan
Teknis
Pengadilan
Agama
Watampone

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone

Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone Tahun 2020-2024 merupakan lanjutan dari Renstra Pengadilan Agama Watampone Tahun 2015-2019 adalah menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dengan Indikator Sasaran dan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2020-2024.

Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone

Dalam rangka mewujudkan harapan di masa depan Pengadilan Agama Watampone Mahkamah Agung RI menetapkan visi sebagai berikut :

“MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG”.

Visi Pengadilan Agama Watampone mewujudkan :

- a. Terpenuhinya sumber daya manusia Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan dibawahnya yang profesional dan berintegritas;
- b. Terpenuhinya kebutuhan anggaran dan sarana prasarana peradilan yang memadai;
- c. Terlaksananya pelayanan publik yang prima oleh Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Misi Pengadilan Agama Watampone:

Untuk mencapai visi Pengadilan Agama Watampone yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan pula misi Pengadilan Agama Watampone sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan dan kuantitas sumber daya manusia;
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pegawai;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan public;
4. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran;
5. Meningkatkan kelembagaan/ organisasi peradilan yang efektif dan efisien;
6. Meningkatkan pengelolaan anggaran secara akuntabel dan transparan;
7. Meningkatkan sistem informasi yang handal dan professional;
8. Meningkatkan ketatalaksanaan yang berkualitas;
9. Meningkatkan penatausahaan aset Negara;
10. Meningkatkan pelayanan adaministrasi.

Tujuan

Terkoordinasinya pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung.

Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2021 (*Audited*) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Watampone. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akrual

Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Watampone menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Watampone dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan akuntansi

6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 (*Audited*) telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Watampone yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Watampone. Disamping itu, dalam

penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan – LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN);
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan – LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Agama Watampone adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan persekot gaji;
 - Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan;
 - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan ganti Rugi (TGR).
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN;
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan

oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca;
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal;
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal;
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan

piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA;
- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun;
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar;
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali

pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya;
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap;
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu;
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat;
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya;
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi;
- Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kebijakan

(6) Kewajiban

Akuntansi atas

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah;
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Agama Watampone telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

Uraian	30 Juni 2020	
	Anggaran Awal	Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Lain-lain	9.520.000	9.520.000
Jumlah Pendapatan	9.520.000	9.520.000
Belanja		
Belanja Pegawai	13.559.833.000	13.559.833.000
Belanja Barang	1.394.484.000	1.394.484.000
Belanja Modal	65.000.000	65.000.000
Jumlah Belanja	15.019.317.000	15.019.317.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp3.738.168,00 dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp9.520.000,00.

Realisasi
Pendapatan
Rp3.738.168,00

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pengadilan Agama Watampone adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	2021		
		Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	9.520.000,00	3.737.550,00	39,26
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	618,00	0,00
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	0,00
Jumlah Pendapatan Bruto		9.520.000,00	3.738.168,00	39,27
Pengembalian		-	-	0,00
Jumlah Pendapatan Netto		9.520.000,00	3.738.168,00	39,27

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 30 Juni 2021 mengalami penurunan sebesar Rp3.269.081,00 atau 46,66 persen dibandingkan realisasi periode

30 Juni 2020. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan dalam Pendapatan sewa tanah dan bangunan (Rumah Dinas).

Perbandingan realisasi PNPB 30 Juni TA 2021 dan TA 2020 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNPB TA 2021 dan TA 2020

(dalam rupiah)

KODE	Uraian	TA 2021	TA 2020	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.737.550,00	7.007.177,00	(3.269.627,00)	(46,66)
425991	Penerimaan kembali Belanja TA Yang Lalu	618,00	72,00	546,00	758,33
Jumlah Pendapatan Netto		3.738.168,00	7.007.249,00	(3.269.081,00)	(46,65)

Belanja

Realisasi
Belanja
Negara
Rp6.319.194.778
, 00

Realisasi Belanja Pengadilan Agama Watampone pada periode 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp6.319.194.778,00 atau 42,07% dari anggaran belanja sebesar Rp15.019.317.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 30 Juni 2021 tersaji sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 30 Juni 2021

(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	13.559.833.000,00	5.750.363.829,00	42,41
52	Belanja Barang	1.394.484.000,00	568.831.033,00	40,79
53	Belanja Modal	65.000.000,00	-	0,00
Jumlah Belanja Bruto		15.019.317.000,00	6.319.194.862,00	42,07
Pengembalian Belanja		-	(84,00)	0,00
Jumlah Belanja Netto		15.019.317.000,00	6.319.194.778,00	42,07

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi belanja periode 30 Juni 2021 secara umum mengalami penurunan sebesar Rp.(79.093.438,00) atau sebesar 1,24% dibandingkan realisasi periode 30 Juni 2021. Hal ini disebabkan tidak adanya realisasi belanja modal pada Semester I Tahun 2021 disebabkan karena Barang berupa P.C. Unit untuk Panitera dan Mesin Antrian Sidang dalam proses pemesanan selama 3 bulan.

Perbandingan realisasi belanja periode 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2021 dan TA 2020

(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/ (Penurunan)	
		2021	2020	(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	5.750.363.745,00	5.429.952.772,00	320.410.973,00	5,90
52	Belanja Barang	568.831.033,00	798.585.444,00	(229.754.411,00)	(28,77)
53	Belanja Modal	-	169.750.000,00	(169.750.000,00)	(100,00)
Jumlah Belanja Netto		6.319.194.778,00	6.398.288.216,00	(79.093.438,00)	(1,24)

Belanja
Pegawai
Rp5.750.363.745
,00

B.2 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai periode 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp5.750.363.745,00 dan Rp5.429.952.772,00. Realisasi Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp320.410.973,00,00 atau 5,90% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai periode 30 Juni 2020. Hal ini disebabkan karena pada periode ini Ketua, Wakil Ketua dan Hakim memperoleh Tunjangan Hari Raya dan ada tambahan CPNS.

Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai Semester I TA 2021 dan TA 2020

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2021	TA 2020	(Rp)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1.615.121.500,00	1.417.713.660,00	197.407.840,00	13,92
Belanja Pembulatan Gaji PNS	21.551,00	18.272,00	3.279,00	17,95
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	111.567.330,00	106.710.840,00	4.856.490,00	4,55
Belanja Tunj. Anak PNS	25.456.446,00	25.702.054,00	(245.608,00)	(0,96)
Belanja Tunj. Struktural PNS	23.040.000,00	20.160.000,00	2.880.000,00	14,29
Belanja Tunj. Fungsional PNS	3.048.520.000,00	2.969.520.000,00	79.000.000,00	2,66
Belanja Tunj. PPh PNS	527.754.202,00	436.386.424,00	91.367.778,00	20,94
Belanja Tunj. Beras PNS	64.453.800,00	55.618.560,00	8.835.240,00	15,89
Belanja Uang Makan PNS	166.764.000,00	187.578.000,00	(20.814.000,00)	(11,10)
Belanja Tunjangan Umum PNS	5.665.000,00	1.295.000,00	4.370.000,00	337,45
Belanja Pegawai (Tunjangan Kemahalan Haim)	162.000.000,00	209.250.000,00	(47.250.000,00)	(22,58)
Realisasi Belanja Bruto	5.750.363.829,00	5.429.952.810,00	320.411.019,00	5,90
Pengembalian	(84,00)	(38,00)	(46,00)	121,05
Realisasi Belanja Netto	5.750.363.745,00	5.429.952.772,00	320.410.973,00	5,90

B.3 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp568.831.033,00

Realisasi Belanja Barang periode 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp568.831.033,00 dan Rp798.585.444,00. Realisasi Belanja Barang mengalami penurunan sebesar Rp(229.754.411,00) atau (28,77)% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang periode 30 Juni 2020. Hal ini disebabkan adanya belanja barang yang belum ada realisasi seperti tambahan langganan internet, pemeliharaan gedung dan bangunan yang belum terealisasi secara maksimal pada semester I Tahun 2021 .

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang Semester I TA 2021 dan TA 2020

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2021	TA 2020	(Rp)	%
Belanja Barang Operasional	308.850.449,00	296.991.486,00	11.858.963,00	3,99
Belanja Barang Non Operasional	-	-	-	#DIV/0!
Belanja Barang Persediaan	11.280.500,00	18.368.500,00	(7.088.000,00)	(38,59)
Belanja Jasa	180.547.434,00	203.043.273,00	(22.495.839,00)	(11,08)
Belanja Pemeliharaan	45.152.650,00	257.257.774,00	(212.105.124,00)	(82,45)
Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	22.924.411,00	75.589,00	0,33
Realisasi Belanja Bruto	568.831.033,00	798.585.444,00	(229.754.411,00)	(28,77)
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	568.831.033,00	798.585.444,00	(229.754.411,00)	(28,77)

Belanja

Modal Rp0,00

B.4 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal periode 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp169.750.000,00. Realisasi Belanja Modal mengalami penurunan sebesar Rp169.750.000,00 atau (100,00)% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal periode 30 Juni 2020. Hal ini disebabkan adanya Realisasi Belanja Modal berupa Penambahan Daya Listrik.

Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal Semester I TA 2021 dan TA 2020

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2021	TA 2020	(Rp)	%
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	169.750.000,00	(169.750.000,00)	(100,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	#DIV/0!
Realisasi Belanja Bruto	-	-	(169.750.000,00)	#DIV/0!
Pengembalian	-	-	-	-

B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tidak mengalami kenaikan dan penurunan atau 0% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 31 Juni 2020. Hal ini disebabkan karena Belanja Modal Peralatan dan Mesin belum terealisasi pada Semester I tahun 2021.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester I TA 2021 dan TA 2020

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2021	TA 2020	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	#DIV/0!
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	#DIV/0!
Pengembalian	-	-	-	-

B.4.2 Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan periode 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp169.750.000,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami penurunan sebesar Rp(169.750.000,00) atau (100)% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan periode 31 Juni 2020. Hal ini disebabkan karena adanya tidak adanya Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan pada tahun 2021.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 dan TA 2018

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2021	TA 2020	(Rp)	%
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	169.750.000,00	(169.750.000,00)	(100,00)
Realisasi Belanja Bruto	-	169.750.000,00	(169.750.000,00)	(100,00)
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	-	169.750.000,00	(169.750.000,00)	(100,00)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Persediaan
Rp962.700,00

C.1 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp962.700,00 dan Rp809.350,00, terjadi kenaikan sebesar Rp153.350,00 atau 18,94%.

Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Rincian Persediaan*(dalam rupiah)*

No	Uraian	31 Desember 2020	Mutasi	30 Juni 2020
1	Barang Konsumsi	809.350,00	153.350,00	962.700,00
Jumlah		809.350,00	153.350,00	962.700,00

Nilai persediaan diatas berdasarkan Berita Acara Opname Fisik Persediaan Nomor: W20-A2/1239.a/OT.00/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.

Tanah
Rp5.238.828.000,00

C.2 Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Watamponeper 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp5.238.828.000,00 dan Rp5.238.828.000,00.

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2019	5.238.828.000,00
Mutasi tambah:	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 30 Juni 2020	5.238.828.000,00

Tabel 11. Rincian Saldo Tanah Per 30 Juni 2021

JENIS BMN	NUP	TANAH MILIK SENDIRI			LUAS TANAH (m2)	NILAI PEROLEHAN
		NO DAN TANGGAL SERTIFIKAT	ALAMAT LOKASI TANAH	KEPEMILIKAN ATAS NAMA		
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	Nomor 13, tanggal 10 Nopember 2014	Jl. Lak. Yos Sudarso No. 49 A Watapone	Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI	3.424	1.122.240.000,00
Jumlah Halaman I					3.424	1.122.240.000,00

JENIS BMN	NUP	TANAH MILIK SENDIRI			LUAS TANAH (m2)	NILAI PEROLEHAN
		NO DAN TANGGAL SERTIFIKAT	ALAMAT LOKASI TANAH	KEPEMILIKAN ATAS NAMA		
Jumlah Halaman I					3.424	1.122.240.000,00
Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1	Nomor 14, tanggal 22 Desember 1982	Jl. Lak. Yos Sudarso No. 20 Watampone	Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI	1.308	460.000,00
Jumlah Halaman II					1.308	460.000,00
Jumlah Halaman I dan II					4.732	1.122.700.000,00

Peralatan dan
Mesin
Rp2.260.106.818
,00

C.3 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp2.260.106.818,00 dan Rp2.379.973.218,00, terjadi penurunan sebesar Rp(119.866.400,00).

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Pembelian	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Pengembangan Melalui KDP	-
Reklasifikasi Masuk	-
Penyelesaian Pembangunan dgn KDP	-
Transfer Masuk	-
Perolehan Tindak Lanjut Normalisasi	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	-
Normalisasi BMN	-
BMN yang dihentikan penggunaannya	119.866.400
Jumlah Mutasi Kurang	(119.866.400)
Jumlah Mutasi	(119.866.400)
Saldo per 30 Juni 2021	2.260.106.818
Akumulasi Penyusutan	(1.886.616.916)
Nilai Buku	373.489.902

Terdapat mutasi kurang pada periode ini disebabkan karena Barang Milik Negara yang dihentikan penggunaannya karena Rusak Berat dan diusulkan untuk penghapusan.

Gedung dan
Bangunan
Rp7.779.656.00
0,00

C.4 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp7.779.656.000,00 dan Rp7.928.483.000,00.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2020	7.928.483.000
Pengembangan	-
Pengembangan Melalui KDP	-
Reklasifikasi Masuk	-
Perolehan Tindak Lanjut Normalisasi	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	-
Penghentian Penggunaan BMN	(148.827.000)
Jumlah Mutasi Kurang	(148.827.000)
Jumlah Mutasi	(148.827.000)
Saldo per 30 Juni 2021	7.779.656.000
Akumulasi Penyusutan	(676.796.378)
Nilai Buku	7.102.859.622

Mutasi kurang Gedung dan Bangunan yang terjadi pada Pengadilan Agama Watampone disebabkan adanya Penghentian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berupa Pagar dan bangunan parkir.

C.5 Jaringan

Jaringan

Rp19.988.100,0

0

Saldo Jaringan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp19.988.100,00 dan Rp19.988.100,00.

Mutasi nilai Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2020	19.988.100
Pembelian	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Pengembangan melalui KDP	-
Penyelesaian Pembangunan dgn KDP	-
Reklasifikasi Masuk	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 30 Juni 2021	19.988.100
Akumulasi Penyusutan	(2.748.361)
Nilai Buku	17.239.739

Tidak terdapat mutasi tambah ataupun mutasi kurang pada asset Jaringan.

Aset Tetap

C.6 Aset Tetap Lainnya

Lainnya Rp14.997.470,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp14.997.470,00 dan Rp14.997.470,00.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2020	14.997.470
Pembelian	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Pengembangan Melalui KDP	-
Penyelesaian Pembangunan dgn KDP	-
Reklasifikasi Masuk	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Transfer Keluar	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 30 Juni 2021	14.997.470
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	14.997.470

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Lainnya yang terjadi pada Pengadilan Agama Watampone

Aset Lain-Lain

C.17 Aset Lain-Lain

Rp427.904.400,00

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp427.904.400,00 dan Rp159.211.000,00.

Adapun mutasi Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2020	159.211.000,00
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	268.693.400,00
Penghapusan BMN yang dihentikan	-
Jumlah Mutasi Kurang	268.693.400,00
Jumlah Mutasi	268.693.400,00
Saldo per 30 Juni 2021	427.904.400,00
Akumulasi Penyusutan	(192.708.186,00)
Nilai Buku	235.196.214,00

Terdapat mutasi tambah untuk Aset lain-lain berupa Aset tetap yang tidak digunakan lagi dalam operasi pemerintahan berupa Barang Milik Negara dengan kondisi Rusak Berat dan diusulkan untuk penghapusan.

C.18 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp(192.708.186
,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp(57.596.820,00) dan Rp(56.726.456,00), terjadi kenaikan sebesar Rp(870.364,00) atau 1,53%.

Akumulasi Penyusutan tersebut merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 30 Juni 2021 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 12. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Lain-Lain	120.263.000,00	(57.596.820,00)	62.666.180,00
Jumlah		120.263.000,00	(57.596.820,00)	62.666.180,00

C.19 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp0,00

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp24.459.610,00. Tidak terdapat Utang kepada Pihak Ketiga yang merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	-	Kekurangan Gaji, Tunjangan Khusus Kinerja, dan Uang Makan yang belum dibayarkan di tahun 2019
2	Belanja Barang yang masih harus dibayar	-	Kekurangan biaya Internet, listrik, air, dan telepon yang belum dibayarkan di tahun 2019
Jumlah		-	

C.20 Ekuitas

Ekuitas
Rp12.983.573.6
47,00

Ekuitas per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp12.983.573.647,00 dan Rp13.155.539.560,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang

merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan PNBPNP
Rp3.737.550,00*

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp3.737.550,00 dan Rp7.007.177,00. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Tabel 13. Perbandingan Rincian Pendapatan 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) %
Pendapatan PNBPNP Lainnya				
Pendapatan dari pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan				
1	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	3.737.550,00	7.007.177,00	(46,66)
Jumlah Pendapatan BMN serta Pendapatan dari Penjualan		3.737.550,00	7.007.177,00	(46,66)
Pendapatan Lain-Lain				
1	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0,00	0,00	#DIV/0!
Jumlah Pendapatan Lain-Lain		0,00	0,00	#DIV/0!
Total		3.737.550,00	7.007.177,00	(46,66)

Pendapatan dari pengelolaan BMN berasal dari sewa Rumah Dinas Pengadilan Agama Watampone Jl. Lak. Yos Sudarso No. 20 Watampone dan gedung dan bangunan pada Gedung Pengadilan Agama Watampone, Jl. Lak. Yos Sudarso No. 49 A Watampone.

D.2 Beban Pegawai

*Beban Pegawai
Rp5.735.403.321,00*

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp5.735.403.321,00 dan Rp5.392.910.230,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 14. Perbandingan Rincian Beban Pegawai 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020*(dalam Rupiah)*

No	Uraian	TA. 2021	TA. 2020	Naik (Turun) %
1	Beban Gaji Pokok PNS	1.615.121.500,00	1.417.294.960,00	13,96
2	Beban Pembulatan Gaji PNS	21.467,00	18.222,00	17,81
3	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	109.384.050,00	106.686.890,00	2,53
4	Beban Tunj. Anak PNS	25.430.538,00	25.692.474,00	(1,02)
5	Beban Tunj. Struktural PNS	23.040.000,00	20.160.000,00	14,29
6	Beban Tunj. Fungsional PNS	3.037.720.000,00	2.969.520.000,00	2,30
7	Beban Tunj. PPh PNS	525.802.966,00	404.153.124,00	30,10
8	Beban Tunj. Beras PNS	64.453.800,00	55.618.560,00	15,89
9	Beban Uang Makan PNS	166.764.000,00	183.221.000,00	(8,98)
10	Beban Tunjangan Umum PNS	5.665.000,00	1.295.000,00	337,45
11	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	162.000.000,00	209.250.000,00	(22,58)
Total		5.735.403.321,00	5.392.910.230,00	6,35

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp6.672.650,00

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp6.672.650,00 dan Rp14.469.300,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 15. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 30 Juni 2021 dan Tahun 2020*(dalam Rupiah)*

No	Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) %
1	Beban Persediaan Konsumsi	6.672.650,00	14.469.300,00	(53,88)
2	Beban Persediaan Lainnya	0,00	0,00	-
Total		6.672.650,00	14.469.300,00	(53,88)

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan
Jasa
Rp479.898.697,00

Beban Barang dan Jasa pada 30 Juni 2021 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp479.898.697,00 dan Rp490.128.241,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Semester I Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 16. Rincian Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020*(dalam Rupiah)*

No	Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) %
1	Beban Keperluan Perkantoran	268.802.949,00	247.278.786,00	8,70
2	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	276.500,00	586.000,00	(52,82)
3	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	24.150.000,00	24.150.000,00	-
4	Beban Barang Operasional Lainnya	15.621.000,00	20.338.700,00	(23,20)
5	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	0,00	2.957.500,00	(100,00)
6	Beban Langganan Listrik	36.261.958,00	35.890.649,00	1,03
7	Beban Langganan Telepon	353.790,00	312.906,00	13,07
8	Beban Langganan Air	4.562.500,00	4.173.700,00	9,32
9	Beban Sewa	129.870.000,00	154.440.000,00	(15,91)
Total		479.898.697,00	490.128.241,00	(2,09)

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan
Rp49.607.150,00

Beban pemeliharaan pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp49.607.150,00 dan Rp261.726.174,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Rincian Beban Pemeliharaan 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020*(dalam Rupiah)*

No	Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) %
1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.609.500,00	131.423.000,00	(91,17)
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0,00	78.300.000,00	(100,00)
3	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	33.543.150,00	47.534.774,00	(29,43)
4	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	4.454.500,00	4.468.400,00	(0,31)
Total		49.607.150,00	261.726.174,00	(81,05)

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan
Dinas
Rp23.000.000,00

Beban Perjalanan Dinas pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp23.000.000,00 dan Rp22.924.411,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020*(dalam Rupiah)*

0

No	Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) %
1	Beban Perjalanan Biasa	23.000.000,00	22.924.411,00	0,33
Total		23.000.000,00	22.924.411,00	0,33

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp196.578.873,00

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp196.578.873,00 dan Rp184.856.885,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2020 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) %
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	95.108.094,00	106.856.594,00	(10,99)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	97.978.530,00	76.880.076,00	27,44
3	Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	249.851,00	249.851,00	-
4	Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	3.242.396,00	870.364,00	-
Jumlah Penyusutan		196.578.871,00	184.856.885,00	6,34
		0,00	0,00	-
Jumlah Amortisasi		0,00	0,00	-
1	Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	0,00	0,00	-
Total		196.578.871,00	184.856.885,00	6,34

D.9 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Surplus dari Kegiatan Non Operasional
Rp618,00

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Rincian Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) %
1	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	618,00	72,00	758,33
2	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	2.406.500,00	(100,00)
3	Beban Penyesuaian nilai Persediaan	-	(1.213.950,00)	(100,00)
Total		618,00	1.192.622,00	(99,95)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp13.155.539.56
0,00

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp13.155.539.560,00 dan Rp11.697.766.712,00.

E.2 Defisit LO

Defisit LO
Rp(6.487.422.523
,00)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah defisit sebesar Rp(6.487.422.523,00) dan Rp(6.358.815.442,00). Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

E.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi
Aset Tetap
Rp0,00

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp
,00

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.5 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas
Rp6.315.456.610,
00

Nilai transaksi antar ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp6.315.456.610,00 dan Rp6.391.280.967,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	6.319.194.778,00
Diterima dari Entitas Lain	(3.738.168,00)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
	6.315.456.610,00

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2021, DDEL sebesar (Rp3.738.168,00) sedangkan DKEL sebesar Rp6.319.194.778,00.

E.5.2 Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL, dan antara KL dengan BA-BUN.

Rincian Transfer Masuk terlampir dalam Calbm. n.

E.6 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing Rp12.983.573.647,00 dan Rp11.730.232.237,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA**F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca**

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca per 30 Juni 2021 pada Pengadilan Agama Watampone yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 30 Juni 2021.

F.2. Keadaan Keuangan Perkara per 30 Juni 2021 :

URAIAN	SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
Saldo Awal	203.959.000,00			
Penerimaan		275.715.000,00		
Biaya Proses/ATK/Pemberkasan*)			10.750.000,00	
Biaya Panggilan			86.266.000,00	
Biaya Penerimaan			0,00	
Biaya Pemberitahuan			17.944.000,00	
Biaya Sita			0,00	
Biaya Pemeriksaan Setempat			0,00	
Biaya Sumpah			0,00	
Biaya Saksi Ahli			0,00	
Biaya Pengiriman			503.000,00	
Biaya Materai			1.360.000,00	
PNBP Biaya Pendaftaran			6.810.000,00	
PNBP Redaksi			1.340.000,00	
PNBP Lain-lain			4.300.000,00	
Pengembalian Sisa Panjar			82.136.000,00	
Biaya Lain-lain			0,00	
Saldo Akhir				268.265.000,00
Jumlah	203.959.000,00	275.715.000,00	211.409.000,00	268.265.000,00

F.2. Pengungkapan Lain-Lain

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone untuk periode yang berakhir 30 Juni 2021 menyajikan pengungkapan-pengungkapan yang meliputi:

1. Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Watampone mengalami perubahan :
 1. Semula BRI Cab. Watampone A/C 0111-01-000120-30-6 menjadi Rekening Virtual dengan nomor rekening : 653243075091000 a.n. Bpg 055 Pengadilan Agama Watampone yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp.0,- (Nol rupiah)

2. Semula BRI A/C 00000111-01-001515-30-0 menjadi Rekening Virtual dengan nomor rekening 651543090761000 a.n. Bpg 055 Pengadilan Agama Watampone yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
3. BRI A/C 0111-01-002396-30-1 a.n. RPL 055 PA WATAMPONE yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp.269.451.000 (Dua ratus Enam puluh Sembilan juta Empat ratus Lima puluh Satu ribu rupiah). Tidak mengalami perubahan

2. Revisi DIPA

DIPA pada Pengadilan Agama Watampone Tahun Anggaran 2021 bernomor : DIPA-005.01.2.307509/2021 tanggal 23 Nopember 2020 berjumlah sebesar Rp15.019.317.000,00 (Lima belas Milyar Sembilan belas juta Tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. DIPA Awal

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)
005.01.01		
1064.EAA.001	511111	3.019,291,000
	511119	40,000
	511121	234.352,000
	511122	55.220,000
	511123	40,320,000
	511124	7,630.280,000
	511125	1.488.475,000
	511126	121,862,000
	511129	510,312,000
	511151	70.881.000
	511157	388.800.000
1066.EAA.002	521111	366.925.000
	521114	970,000
	521115	57,960,000
	521119	15.620.000
	521811	24,500,000
	522111	91,440,000
	522112	2,400,000
	522113	11,448,000
	522141	238,680,000

	523111	140,320,000
	523119	78,300,000
	523121	92,611,000
	524111	51,340,000
1066.EAC.003	521241	16,143,000
1071.EAD.001	532111	65.000.000
	Total	15.019.317.000

b. Revisi DIPA 1 (Tanggal 11 Pebruari 2021)

Tidak terdapat perubahan nilai pagu pada Revisi DIPA 1.

Revisi RPD, Halaman III DIPA

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)
005.01.01		
1064.EAA.001	511111	3.019,291,000
	511119	40,000
	511121	234.352,000
	511122	55.220,000
	511123	40,320,000
	511124	7,630.280,000
	511125	1.488.475,000
	511126	121,862,000
	511129	510,312,000
	511151	70.881.000
	511157	388.800.000
1066.EAA.002	521111	366.925.000
	521114	970,000
	521115	57,960,000
	521119	15.620.000
	521811	24,500,000
	522111	91,440,000
	522112	2,400,000
	522113	11,448,000
	522141	238,680,000
	523111	140,320,000
	523119	78,300,000
	523121	92,611,000

	524111	51,340,000
1066.EAC.003	521241	16,143,000
1071.EAD.001	532111	65.000.000
	Total	15.019.317.000

- c. Revisi DIPA II (Tanggal 15 April 2021)
 Tidak terdapat perubahan nilai pagu pada Revisi DIPA 1.
 Revisi RPD, Halaman III DIPA dan Revisi POK

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)
005.01.01		
1064.EAA.001	511111	3.019,291,000
	511119	40,000
	511121	234.352,000
	511122	55.220,000
	511123	40,320,000
	511124	7,630.280,000
	511125	1.488.475,000
	511126	121,862,000
	511129	510,312,000
	511151	70.881.000
	511157	388.800.000
1066.EAA.002	521111	367.465.000
	521114	970,000
	521115	57,960,000
	521119	19.758.000
	521811	24,500,000
	522111	91,440,000
	522112	2,400,000
	522113	11,448,000
	522141	238,680,000
	523111	140,320,000
	523119	78,300,000
	523121	91.111.000
	524111	51,340,000
1066.EAC.003	521241	16,143,000

1071.EAD.001	532111	65.000.000
Total		15.019.317.000

3. Penjelasan terkait Jurnal Bantu pada menu Jurnal Penyesuaian aplikasi SAIBA 2020.

Jurnal Penyesuaian

- Pada tanggal 2 Januari 2021 merupakan jurnal balik dari penyajian jurnal akrual Tahun Anggaran Yang Lalu;

4. Tidak Terdapat perbaikan Transaksi SPM/SP2D/SSPB/SSBP

Berdasarkan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI., Nomor 17/WKMA.NY/SK/XII/2020 Tanggal : 2 Desember Tahun 2020 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya maka Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Watampone adalah Sekretaris Pengadilan Agama Watampone yaitu :

H.A.Fajar Sjam Sawerilongi, SE.,M.Si

Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Agama Watampone Nomor : W20-A2/002/KU.00/SK/I/2021 tanggal 2 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji dan Penandatanganan SPM dan Staf Pengelola Keuangan :

Pejabat Pembuat Komitmen : Nurhidayah, S.Ag
 Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM : Maftukhah Mustafa, S.Kom
 Bendahara : Heriawati, SH

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2019

LAMPIRAN A.1
TABEL PENYUSUTAN SEMESTER I TA. 2021

NAMA UAKPB : 005.01.19.307509 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 30 JUNI 2021						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	PERALATAN DAN MESIN		461	2.260,106,818	1,909,325,222	95,108,094	-117,816,400	1,886,616,916	373,489,902
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Unit	10	455,024,828	455,024,828	0	0	455,024,828	0
3.05.01	ALAT KANTOR	Buah	87	294,493,200	218,430,000	11,315,800	0	229,745,800	64,747,400
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	Buah	285	592,550,800	569,750,322	17,624,295	-33,049,000	554,325,617	38,225,183
3.06.01	ALAT STUDIO	Buah	6	30,136,000	24,035,800	3,013,600	-4,995,000	22,054,400	8,081,600
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI	Buah	2	22,845,000	25,345,000	0	-2,500,000	22,845,000	0
3.06.03	PERALATAN PEMANCAR	Buah	1	149,985,000	74,992,500	7,499,250	0	82,491,750	67,493,250
3.10.01	KOMPUTER UNIT	Buah	44	509,342,600	376,513,350	43,883,075	-58,908,000	361,488,425	147,854,175
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER	Buah	26	205,729,390	165,233,422	11,772,074	-18,364,400	158,641,096	47,088,294
133111	GEDUNG DAN BANGUNAN		10	7,779,656,000	588,965,144	97,978,530	-10,147,296	676,796,378	7,102,859,622
4.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	Unit	6	6,766,616,000	516,482,450	85,898,081	-10,147,296	592,233,235	6,174,382,765
4.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	Unit	3	720,981,000	50,301,000	8,383,500	0	58,684,500	662,296,500
4.04.01	TUGU/TANDA BATAS	Unit	1	292,059,000	22,181,694	3,696,949	0	25,878,643	266,180,357
134113	JARINGAN		1	19,988,100	2,498,510	249,851	0	2,748,361	17,239,739
5.04.02	JARINGAN LISTRIK		1	19,988,100	2,498,510	249,851	0	2,748,361	17,239,739
166112	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN		47	426,554,400	61,502,092	3,242,398	127,963,696	192,708,186	233,846,214
3.05.01	ALAT KANTOR	Buah	1	24,975,000	24,975,000	0	0	24,975,000	0
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	Buah	23	33,749,000	0	175,000	33,049,000	33,224,000	525,000
3.06.01	ALAT STUDIO	Buah	1	4,995,000	0	0	4,995,000	4,995,000	0
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI	Buah	1	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000	0
3.10.01	KOMPUTER UNIT	Buah	10	87,178,000	28,270,000	0	58,908,000	87,178,000	0
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER	Buah	9	18,364,400	0	0	18,364,400	18,364,400	0
4.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	Unit	1	148,827,000	0	1,691,216	10,147,296	11,838,512	136,988,488
4.04.01	TUGU/TANDA BATAS	Unit	1	105,966,000	8,257,092	1,376,182	0	9,633,274	96,332,726
TOTAL				10,486,305,318	2,562,290,968	196,578,873	0	2,758,869,841	7,727,435,477

Watampone, 30 Juni 2021
 Penanggung Jawab UAKPB
 Kuasa Pengguna Barang

 H. Andi Fajar Slam Sawerilongi, SE.,M.Si
 NIP. 19741214.200604.1.002

LAMPIRAN A.2

TABEL RINCIAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

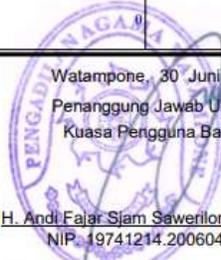
SEMESTER I TA. 2021

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA SEMESTERAN
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2021

Tanggal : 23-09-2021
Halaman : 1
Kode Lap. : LBSKSSKS

NAMA UAKPB : 005.01.19.307509 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		JUMLAH SD 1 JANUARI 2021	PENAMBAHAN	KDP YG MENJADI ASET DEFINITIF	JUMLAH SD 30 JUNI 2021	KETERANGAN
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0	
	TIDAK ADA DATA	0	0	0	0	
	TOTAL	0	0	0	0	


 Watampone, 30 Juni 2021
 Penanggung Jawab UAKPB
 Kuasa Pengguna Barang
 H. Andi Fajar Siam Sawerlongi, SE.,M.Si
 NIP. 19741214.200604.1.002

LAMPIRAN A.3

HIBAH

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
 INTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
 SEMESTER I
 TAHUN ANGGARAN 2021

NAMA UAKPB : 005.01.19.307509 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
 JENIS TRANSAKSI :

Tanggal : 23-09-2021
 Halaman : 1
 Kode Lap. : DTBSSSKS

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	INTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5
			0	0
....	TIDAK ADA DATA		0	0
	TOTAL			0

Watampone, 30 Juni 2021
 Penanggung Jawab UAKPB
 Kuasa Pengguna Barang

H. Andi Fajar Sjam Sawerlongi, SE.,M.Si
 NIP. 19741214 200604 1.002

